



Jaga Ketenteraman, Ikuti Aturan

TAJUK

Kota Jogja bukan DKI Jakarta yang riuh tak keruan karena pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tentu saja semua masyarakat di kota ini juga tak ingin keriuhan itu menjalar bak penyakit menular karena persoalan kemenangan calon dalam Pilkada.

Rabu 15 Februari 2017 pesta demokrasi di Kota Jogja digelar. Proses pemungutan suara berjalan lancar, selayaknya pesta pada umumnya. Sayangnya, pesta ini tak ditutup gembira, melainkan kekisruhan yang segera menghangatkan suasana.

Dua kubu peserta Pilkada

2017, pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota nomor urut satu dan dua, sama-sama mengklaim kemenangan.

Berdasarkan data Tim Pemenangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi, pasangan itu menang tipis atas Imam Priyono dan Achmad Fadli. Mereka meraup 98.967 suara, lebih banyak 1.436 suara dari Imam dan Achmad Fadli dan mengumpulkan 97.531 suara.

Di sisi lain, pasangan nomor urut dua Imam Priyono dan Achmad Fadli juga mengaku menang. Mereka juga menghitung cepat hasil pilkada dan hasilnya mengantongi

51,75% dukungan. Perhitungan itu berdasarkan pesan singkat yang dikirim saksi dari tiap tempat pemungutan suara (TPS) dengan rentang kesalahan 2,5%.

Suasana makin panas saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja mengunggah hasil penghitungan suara versi C1 di *website* KPU. Data menyebut pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi mengumpulkan suara 100.332, lebih banyak daripada pasangan yang diusung PDIP, Imam Priyono dan Achmad Fadli yang meraup 99.143 suara.

Proses unggah ini diprotes

kubu PDIP, sebab hasil rekapitulasi manual belum dilakukan KPU. Mereka khawatir bisa memengaruhi opini publik. Protes demi protes dilancarkan. Bahkan keluar ancaman akan mengerahkan massa ke KPU, dan permintaan membuka kotak suara dan menjaganya bersama. Padahal KPU menyebut unggahan data itu sifatnya sementara.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X tegas mengatakan agar semua pihak tenang dan tak makin panas. Sultan meminta semua pihak tenang dan menunggu hasil rekapitulasi suara KPU Jogja. KPU Jogja juga menyebut

proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara terbuka di Kantor KPU Kota Jogja. KPU pada prinsipnya akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemilu. Menurut KPU kotak suara dapat dibuka jika ada perbedaan suara antara hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan data yang dimiliki saksi.

Tentu saja semua pihak yang panas harus menahan diri. Ada mekanisme jelas sesuai aturan. Paling terang adalah menunggu hasil rekapitulasi, bukan main paksa. Sebab

setelah rekapitulasi dilakukan, ketidakpuasan hasil pemilu bisa digugat bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi.

KPU telah tegas menyebut berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Tentu saja semua pihak seharusnya bisa berjalan sesuai koridor peraturan. Jika memang ada bukti seperti yang disyaratkan KPU agar kotak suara bisa dibuka, maka hal itu bisa saja diajukan untuk dilakukan. Namun jika bukti itu tak ada, hanya omongan belaka, tentu saja KPU harus tegas tidak melakukannya. Jangan hanya karena tekanan satu pihak, prosedur dilanggar. Seperti kata Sultan, semua harus tetap tenang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005